

## **BAB II**

### **SEJARAH HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DENGAN PALESTINA**

Sejarah hubungan Amerika Serikat dengan Palestina yaitu dari bantuan kemanan yang diberikan Amerika Serikat terhadap konflik yang telah melanda Palestina. Berikut hubungan dalam bentuk bantuan Amerika Serikat terhadap Palestina:

#### **A. Bantuan Keamanan Amerika Serikat (AS) terhadap Palestina**

Upaya negosiasi untuk mencapai perdamaian Israel-Palestina dilakukan Presiden AS, Bush senior bersama dengan Uni Soviet melalui konferensi perdamaian Madrid pada 30 Oktober 1991. Konferensi tersebut dihadiri beberapa negara Arab seperti Yordania, Libanon, Siria, Palestina, dan Israel. Pertemuan tersebut berhasil mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk pertama kali khususnya Israel-Palestina. Dalam negosiasi tersebut, Amerika Serikat berperan sebagai mediator utama konflik. Hasilnya tidak ada kesepakatan signifikan terhadap resolusi damai antara Israel dan Palestina (Rodriguez, 2011:45). Tapi konferensi Madrid membawa proses penyelesaian pada Kesepakatan Oslo 1993 (Preble & Hadar:541-542). Kesepakatan Oslo menghasilkan upaya pembentukan satuan polisi Palestina. Sehingga banyak juga pendonor yang memberikan bantuan pada Palestina. Namun, bantuan tersebut masih terfokus pada polisi Palestina dan belum tertuju pada reformasi sektor keamanan (Friedrich dan Luethold, 2008:6).

Secara historis, pada 4 Mei 1994 Palestina dan Israel menandatangani perjanjian yang menyepakati ditariknya pasukan militer Israel dari wilayah Palestina di Gaza dan Jericho pada 11 Mei 1994. Lalu pada 28 September 1995, ditandatangani perjanjian sementara yang disebut Taba Agreement. Perjanjian ini berisi kesepakatan dilaksanakannya pemilu untuk Majelis Palestina, pembebasan tahanan Israel, penarikan mundur tentara Israel dari wilayah Tepi Barat. Pada

pelaksanaannya, tentara Israel mulai meninggalkan Tepi Barat pada akhir tahun 1995. Jika diamati berdasarkan tabel di atas, pada tahun 1994-1995 bantuan yang diberikan lebih besar jika dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Hal itu dikarenakan kebutuhan pada tahun 1994-1995 digunakan untuk keperluan Taba Agreement dan transisi pemerintahan sementara Palestina. Lalu pemilu dilaksanakan pada 20 Januari 1996 (Mark,2001:1).

Selanjutnya pada tahun 1996-1998, bantuan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Palestina jumlahnya semakin menurun karena beberapa alasan. *Pertama*, pada Mei 1996, Benyamin Netanyahu terpilih sebagai Perdana Menteri Israel yang berakibat pada terhentinya penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Palestina. Terpilihnya Netanyahu membuat interaksi Israel dan Palestina untuk negosiasi damai terhenti sehingga bantuan pun menurun jumlahnya. Akhirnya pada tahun 1997, pasukan Israel ditarik dari Hebron. Pada tahun 1998, perjanjian lima tahun untuk menarik mundur pasukan Israel sejak 1993 dari wilayah Palestina telah berakhir. Berakhirnya kesepakatan lima tahun untuk menarik mundur pasukan Israel juga menandakan semakin menurunnya bantuan AS terhadap Palestina bahkan mencapai nilai nol untuk transisi pemerintahan otonomi pada tahun 1998 (Mark,2001:1).

Pada perjanjian Wye River 28 Oktober 1998, disepakati langkah-langkah untuk mengimplementasikan perjanjian sebelumnya. Saat itu CIA ditugaskan untuk melakukan pemantauan pembentukan satuan polisi Palestina dan kerjasama keamanan antara Israel dan Palestina. Kerjasama keamanan kedua negara terkait dengan jaminan keamanan tapi daftar kewajiban jaminan keamanan hanya ditujukan untuk Palestina. Adapun kewajiban yang harus Palestina lakukan diantaranya memerangi terorisme, menangkap tersangka terorisme, melarang adanya hasutan teror, mengumpulkan semua senjata ilegal dalam waktu tiga bulan setelah tanda

tangan perjanjian, memberikan daftar calon polisi Palestina pada Israel, dan memberikan laporan kemajuan pada Amerika Serikat (Friedrich dan Luethold, 2008:7).

Lalu pada tahun 2000 diadakan negosiasi Camp David untuk perdamaian Israel-Palestina namun gagal karena pemukiman Yahudi masih saja terus dibangun dan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina ke wilayah yang telah diduduki Israel sejak 1948 menjadi penyebabnya (Preble & Hadar:541-542). Kejadian yang menyusul yaitu peristiwa Intifada Kedua pada tahun 2000. Abbas mengecam intifada kedua yang terjadi pada tahun 2000. Menurutnya kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik Israel-Palestina tidak bisa dicapai melalui kekerasan atau solusi militer (Pina, 2006:3).

Pada 2001 terjadi serangan terhadap menara kembar *World Trade Center* di AS pada 11 September 2001. Kejadian-kejadian tersebut membuat AS harus mengelola pengaruhnya di Timur Tengah dengan biaya yang tidak sedikit baik secara militer dan inisiatif negosiasi perdamaian konflik Israel-Palestina. Dalam menginisiasi perdamaian Israel-Palestina, AS juga harus berhadapan dengan aktor lain di wilayah regional Timur Tengah yaitu Irak dan Iran (Preble & Hadar:541-542).

Pada tahun 2002, sesuai dengan Tenet Workplan, Bush memperluas peran CIA dengan melakukan gencatan senjata di Palestina. CIA mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keamanan satuan Palestina dibantu instruktur dari Mesir dan Yordania. Tujuan dilakukannya pelatihan tersebut juga untuk menahan pembom bunuh diri rakyat Palestina di Israel. Di sisi lain, pihak Israel yaitu Mantan Kepala Intelijen Mossad, Ephraim Halevy dan Sekretaris Militer Perdana Menteri Israel, Jendral Moshe Kaplinsky menyusun rancangan untuk menggeser kekuasaan Presiden Palestina Yasser Arafat (Friedrich dan Luethold, 2008:7).

Hubungan AS dan Palestina tidak berjalan baik karena George W. Bush menganggap Yaser Arafat tidak berupaya untuk menghentikan terorisme. Tujuan dari rencana menggeser kekuasaan rezim Arafat sebenarnya untuk membentuk kepemimpinan dan kekuasaan baru di Palestina. Pemimpin baru Palestina akan diberikan tanggungjawab keamanan di Palestina. Rencana tersebut didukung pihak internasional diantaranya Mesir, Yordania, Inggris, dan Amerika Serikat (Friedrich dan Luethold, 2008:7).

Pemerintahan sementara Palestina dipimpin oleh presiden Mahmoud Abbas. Abbas memecat Haniyeh dari Hamas sebagai perdana menteri. Lalu Abbas menunjuk Salam Fayyad, politisi independen Palestina yang populer dan dekat dengan pemerintahan Barat dan memiliki sifat yang moderat (Kushner dan Bedein, 2011:5). Pada 24 Juni 2002, Bush menyatakan akan mengupayakan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Pada 30 April 2002, AS bersama anggota kuartet *Road Map* lainnya mensosialisasikan rencana perdamaian untuk kedua negara (Mark, 2005: 6). Isi *Road Map* sebenarnya penekanan kembali dari perjanjian yang sudah ada sebelumnya yaitu perjanjian Wye River dan Tenet Workplan. Dalam hal ini pihak Israel dan Palestina memiliki kewajiban jaminan keamanan masing-masing dan bertanggungjawab terhadap negara-negara kuartet (Friedrich dan Luethold, 2008:7).

Pada tahun 2005, pemerintah otoritas Palestina yang dipimpin Mahmoud Abbas membentuk *National Security Council* untuk mengkonsolidasikan elemen-elemen keamanan di Palestina (Pina, 2006:2). Untuk mencapai hal tersebut, AS memberikan bantuan luar negeri melalui program *security sector reform*. Perbaikan sektor keamanan meliputi reformasi struktur lembaga yang memberikan kewenangan terhadap sipil terhadap lembaga keamanan. Berdasarkan USAID, keamanan AS bergantung pada keamanan negara-negara yang menjalankan sistem demokrasi. Reformasi sektor keamanan menjadi program yang termasuk ke dalam *Joint Strategic*

*Plan* tahun 2007-2012 oleh Departemen luar negeri dan USAID. Kedua lembaga tersebut juga bekerjasama dengan Departemen Pertahanan dan *intra-agency* lainnya. Reformasi sektor keamanan terhadap suatu negara merupakan intervensi dari negara lain. Karena itu, kerjasama antar lembaga lebih efektif untuk merencanakan dan mengimplementasikan perbaikan sektor keamanan tersebut (USAID, 2010:1).

Terpilihnya Abbas sebagai presiden Palestina juga membuat donor lebih tertarik untuk memberikan bantuan pada program reformasi sektor keamanan. negara-negara Kuartet juga melibatkan negara-negara Eropa seperti Inggris dan Jerman untuk ikut terlibat dalam reformasi keamanan di Palestina. Keikutsertaan banyaknya aktor internasional disebutkan Amerika Serikat sebagai strategi *West Bank first*. Strategi tersebut mendukung berjalannya pemerintahan di Tepi Barat dengan tujuan dapat mengisolasi pemerintahan di Jalur Gaza (Friedrich dan Luethold, 2008:7-9).

Kemampuan AS untuk memberikan bantuan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik Palestina. Namun, keputusan tersebut juga bergantung pada level kesadaran populer masyarakat Palestina terhadap kebijakan AS dan bantuan jangka panjangnya. Kesediaan AS mendukung Palestina merupakan upaya untuk melawan Hamas dan mereformasi kondisi politik dan ekonomi Palestina (Zanotti dan Browne, 2011:17). Persoalan stagnasi ekonomi menjadi isu domestik yang dihadapi Abbas ketika menjabat sebagai presiden. Palestina memiliki oposisi dari pemerintahan misalnya *al-Aksa Martyrs Brigade* dari kelompok nasionalis dan Hamas dari kelompok Islamis. Kelompok oposisi tersebut cenderung menolak bekerja sama dengan Israel (Pina, 2006:3).

Selain menginisiasi perdamaian, Bush juga menambahkan misi demokratisasi dalam kebijakan luar negerinya. Melalui misi demokratisasi yang diterapkan oleh Palestina, pihak AS

berharap bisa mendapatkan keuntungan. Dalam asumsi AS, pemimpin Palestina yang terpilih berdasarkan sistem demokrasi bisa bekerjasama dengan AS dan tidak anti dengan Israel. Akhirnya pada Januari 2006 dilaksanakan pemilu parlemen di Palestina. Hamas yang anti AS berhasil mengalahkan Fatah yang lebih moderat dalam pemilu tersebut. AS pun menekan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengadakan pemilu kembali. AS menolak untuk mengakui hasil pemilu parlemen awal. Lalu AS, Israel, dan Uni Eropa menghentikan bantuan ekonomi untuk Pemerintah Otonomi Palestina kecuali jika Hamas berkomitmen untuk menghentikan kekerasan dan mengakui Israel. Akhirnya pada Juni 2007, AS dan pemerintah Israel mendorong Fatah untuk membentuk pemerintahan yang terpisah di Tepi Barat dan Hamas di Jalur Gaza (Preble & Hadar:543).

AS memberikan bantuan bilateral pada Palestina sebesar dua miliar dolar untuk wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza pada tahun 2007. Program yang diberikan AS merefleksikan strategi untuk tetap menghargai Hamas dengan memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza untuk kebutuhan dasar, bantuan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat Gaza, dan bantuan keamanan untuk tujuan melawan dan mencegah aktivitas terorisme (Zanotti, 2010:27).

Tujuan dari diberlakukannya penegakan hukum dan aturan tidak lantas untuk tujuan persiapan pembentukan negara Palestina. Ada alasan lain AS membantu Palestina dalam hal keamanan. Keamanan Palestina tentu akan berpengaruh terhadap keamanan Israel. Menurut Bedein dan Kushner (2011:7), AS memiliki tujuan untuk melemahkan kelompok yang oleh AS dianggap sebagai teroris di Tepi Barat. Teroris yang dianggap oleh AS adalah Hamas. Sehingga, pemerintah Palestina akan memiliki kemampuan untuk melawan Hamas.

Hamas merupakan organisasi pergerakan dan perlawanan Islam Palestina yang berbasis militer dan sosial politik. Sebagai organisasi militer, Hamas seringkali melakukan perlawanan

terhadap pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Secara politik, organisasi ini juga menolak keras adanya kerjasama dengan Israel terkait proses perdamaian Israel-Palestina. Akibatnya, AS menganggap Hamas sebagai organisasi teroris karena hal tersebut pada 1997. Beberapa negara misalnya Iran, Siria, dan Hezbollah dari Libanon memberikan bantuan dan pelatihan juga untuk Hamas (Zanotti, 2010:1). Iran memimpin negara-negara Arab untuk memberikan bantuan finansial dan militer untuk Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya. Setiap tahun Iran memberikan 20-30 juta dolar AS untuk Hamas. Selain itu, Iran juga menyelundupkan senjata dan melatih kelompok militan melalui terowongan bawah tanah Gaza-Sinai untuk meningkatkan kemampuan Hamas secara militer (Zanotti, 2010:22-23).

Pada intifada pertama tahun 1994-1997 dan kedua tahun 2000-2008, Hamas telah membunuh sekitar 700 orang Israel (Zanotti, 2010:4). Untuk kepentingan perdamaian Israel-Palestina jangka panjang dan juga keamanan Israel, AS merumuskan kebijakan luar negerinya untuk dapat menghalangi dan meminggirkan posisi Hamas di dalam konflik. Beberapa diantara kebijakan AS terkait Hamas yaitu meng-*counter* Hamas secara finansial, jaringan, dan pengaruh politik; melibatkan perwakilan Hamas ke dalam negosiasi perdamaian Israel Palestina; memutus jaringan Hamas dengan Iran dan Siria; meningkatkan bantuan kemanusiaan dan ekonomi di Gaza tanpa Hamas (Zanotti, 2010:1).

## **B. Reformasi Sektor Keamanan terhadap Palestina Melalui USSC**

Menurut Kerkkanen, Rantanen, & Sundqvist (2008: 5) konsep polisi Palestina sudah ada sejak pendudukan wilayah Palestina pada 1967 berdasarkan kesepakatan Arab-Israel. Perjanjian Camp David pada 1978 melihat bahwa dibentuknya polisi Palestina sebagai bagian dari kesepakatan otonomi untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pada 1992, Palestina dan Yordania bertemu untuk mendiskusikan persiapan pembentukan lembaga kepolisian Palestina dengan kekuatan

sebesar 20.000 orang. Kepolisian Palestina dijalankan pasca Israel menarik mundur pasukannya pada tahun 1993 (Kerkkanen, Rantanen, & Sundqvist, 2008: 6).

AS memberikan bantuan keamanan pertama kali pada Palestina saat pembentukan pemerintahan otonomi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 1993 (Bouris, 2011: 3). Bantuan yang diberikan AS berupa perlengkapan militer dan dana yang ditujukan untuk memperbaiki sistem keamanan di Palestina sebesar 36 juta dolar AS melalui Bank Dunia dan secara tunai sebesar 5 juta dolar AS (Sharp, 2006: 4)

Pada Mei 1994 polisi sipil bertambah besar dan penting dan masuk ke dalam struktur lembaga keamanan Palestina. Arafat juga meminta PBB untuk mengepalai pelatihan polisi Palestina di daerah pendudukan pada September 1994. Ide tersebut ditentang Israel. Untuk mengkoordinasikan bantuan dari donor multilateral maka dibentuklah sebuah badan *Co-ordination Committee of International Assistance to the Palestinian Police Force* (COPPS) di Kairo pada 24 Maret 1994. COPPS terdiri dari perwakilan beberapa negara seperti AS, Rusia, Uni Eropa, Norwegia, Jepang, Mesir, PLO, dan Israel. Lembaga ini menjadi cikal bakal berdirinya EUPOL COPPS (Kerkkanen, Rantanen, & Sundqvist, 2008: 8).

COPPS berupaya melakukan mitigasi dan menawarkan perangkat sistem komunikasi dengan memberikan *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH) berupa 95 set radio pada 8 Agustus 1994. Pada 1997, jumlah polisi sipil sebanyak 10.500 terdiri dari 6.500 di Tepi Barat dan 4.000 di Jalur Gaza. Ada juga 350 polisi wanita. Pada tahun 1996-1997 polisi sipil memiliki 18 kantor polisi dan 25 pos polisi di Tepi Barat. Pos-pos tersebut memperkerjakan 8.000 hingga 11.000 personil dengan 1.000 perwira. Pada tahun 2000, personil meningkat sebanyak 14.000 dan 23 departemen spesial dibentuk (Kerkkanen, Rantanen, & Sundqvist, 2008: 8).

Sistem pemerintahan otonomi menuntut Palestina bertanggungjawab terhadap keamanan internal teritorialnya dengan konteks kondisi keamanan Palestina yang minim fasilitas dan regulasi yang ada tidak sesuai standar (Zanotti, 2010:). Secara operasional, Polisi Palestina mengalami kekurangan peralatan standar keamanan seperti seragam, radio, kendaraan, perisai, dan topi baja. Secara teknis, polisi Palestina tidak memiliki regulasi yang baku untuk menjalankan tugas menjaga keamanan (Palm, 2010:19).

Selain itu, menurut Ball, Bartu, dan Verheul (2006:19), polisi Palestina juga tidak memiliki monopoli dan kontrol terhadap akses kekerasan. Secara hukum lembaga keamanan juga tidak memiliki undang-undang tegas yang mengatur mereka dan peradilannya lemah. Mereka tidak memiliki komunikasi yang baik antara polisi di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza karena ada konflik domestik faksional di dalamnya antara Fatah dan Hamas.

Konflik domestik faksional yang terjadi di dalam internal melibatkan dua aktor yaitu Fatah dan Hamas. Kedua faksi ini memiliki cara yang berbeda dalam konflik menghadapi Israel. Fatah cenderung bisa untuk bernegosiasi damai sedangkan Hamas menolak untuk bernegosiasi dan cenderung menggunakan perlawanan dan pertahanan bersenjata (Cohen & White, 2009:1). Kedua faksi ini juga memiliki pemerintahan masing-masing, yakni, Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Jalur Gaza. Terpecahnya dua faksi internal antara Fatah dan Hamas berakibat pada tidak menyatunya Palestina sebagai kekuatan utuh untuk melawan Israel (Brown, 2010:37).

Brown (2010:37-40) menjelaskan bahwa pemerintahan Tepi Barat yang dipimpin Fatah lebih diakui oleh Amerika Serikat karena masih bisa diajak untuk bekerjasama. Israel pun berharap agar Hamas bisa mendapatkan isolasi ekonomi dan diplomasi sehingga posisi Hamas tidak membahayakan Israel. Fatah di bawah Perdana Menteri Salam Fayyad memerintahkan polisi dan lembaga keamanan untuk tidak hanya menegakkan hukum lalu lintas dan ketertiban umum tapi

juga mencegah adanya meluasnya pengaruh Hamas di Tepi Barat. Pencegahan terhadap pengaruh Hamas diantaranya dengan menahan aktivis Hamas, melarang lembaga non pemerintah bekerjasama dengan Hamas, dan memutuskan hubungan kerja bagi warga sipil yang mendukung Hamas.

Lebih lanjut, Brynjar Lia dalam Kerkkanen, Rantanen, & Sundqvist (2008: 6) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa polisi Palestina masih memiliki banyak kekurangan dalam hal struktur organisasi, garis komando, disiplin internal, koordinasi, dan akuntabilitas mekanisme. Polisi Palestina, *Preventive Security* dan *Civil defense* saat itu berada di bawah komando langsung dari Arafat. Tambahnya, polisi Palestina melihat dirinya sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan nasional Palestina daripada menegakkan hukum dan ketertiban (Kerkkanen, Rantanen, & Sundqvist, 2008: 5-10).

Struktur organisasi yang terdapat di internal kepolisian Palestina mengalami *gap* dalam komando dan kontrol. Komando fungsional polisi Palestina tidak menggunakan dokumen, *guidelines*, dan *rules*. Mereka memberikan komando secara lisan. Hanya 5 persen aksi kriminal yang selesai melalui investigasi dan pengadilan (Kerkkanen, Rantanen, & Sundqvist, 2008: 14).

Selanjutnya, AS mengalihkan bantuan keamanan menjadi bantuan kemanusiaan untuk Palestina saat Intifada kedua terjadi pada tahun 2000 hingga 2004 yang mengakibatkan korban tewas dari Palestina dan Israel sebanyak 4000 orang (US GAO, 2010: 8). Di sisi lain, infrastruktur kepolisian mengalami kerusakan berat. Sekitar 45 bangunan polisi dan kompleks di Tepi Barat dan Jalur Gaza hancur termasuk laboratorium forensik di Gaza dan kompleks polisi di Ramallah (Kerkkanen, Rantanen, & Sundqvist, 2008: 10) Peristiwa Intifada kedua membuat kondisi keamanan kedua negara tidak stabil sehingga proses negosiasi antara kedua negara menjadi

terhambat. Jika negosiasi tidak terjadi, upaya menuju perdamaian Israel-Palestina akan sulit tercapai (Bouris, 2011: 3).

Di tengah intifada pada tahun 30 April 2003, pihak internasional diantaranya AS, Rusia, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau *Kuartet* melakukan upaya negosiasi untuk stabilitas keamanan Israel-Palestina salah satunya melalui reformasi sektor keamanan yang disebut sebagai *Road Map Plan for Peace* (Mark, 2005: 4; Sayigh, 2009: 3). *Road Map Plan for Peace* merupakan strategi untuk kemerdekaan Palestina dan Perdamaian Isrel-Palestina. Untuk mencapai tujuan tersebut, Israel dan Palestina memiliki kewajiban yang harus dijalankan disebut *Road Map Obligations* (Zanotti, 2010: 7).

Kewajiban yang harus dipenuhi Palestina diantaranya mengakhiri aktivitas kekerasan terhadap Israel, memastikan seluruh aparat keamanan agar tidak terkoneksi dengan aktivitas teroris, dan meningkatkan kapabilitas lembaga keamanan Palestina di bawah Kementerian Dalam Negeri (US GAO, 2010: 9). Sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dari *Road Map for Peace*, AS membentuk USSC pada tahun 2005 yang dikepalai Letnan Jendral Keith Dayton (Dermer, 2010: 68).

*United States Security Coordinator* (USSC) merupakan lembaga yang didirikan Condoleeza Rice, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk pemerintah otonomi Palestina pada tahun 2005 (Kushner dan Bedein, 2011: 2). Lembaga ini bertujuan untuk *mereformasi* elemen-elemen keamanan Palestina dan mengkoordinasikan bantuan keamanan dari beberapa negara donor termasuk AS (US GAO, 2010: 10).

Sebagai pemimpin USSC, Dayton memiliki latar belakang sebagai pemimpin *George C. Marshall European Center for Security Studies*. Ia juga pernah menjadi pemimpin operasi intelijen untuk agen pertahanan di Washington D.C. Selain itu, ia juga pernah bertugas di Iraq sebagai

pemimpin *the Iraqi Survey Group for Operation Iraqi Freedom* (Marshallcenter.org; Abdullah, 2009: 21).

Secara umum, USSC memiliki empat program. Pertama, USSC melakukan *reformasi* sektor keamanan melalui pelatihan dan pemberian peralatan militer. Kedua, USSC memiliki misi untuk meningkatkan *kapasitas* Kementerian Dalam Negeri Palestina yang bertanggungjawab terhadap seluruh pasukan keamanan. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang layak sesuai standar keamanan sebuah negara yang normal. Keempat, *training* untuk *senior leader*. USSC telah melatih dua kelas letnan kolonel dan kolonel melalui dua bulan seminar sebanyak 36 orang. Tujuan pelatihan untuk *senior leader* yaitu agar mereka memahami permasalahan yang terjadi dalam konflik dan dapat bekerja sama dengan baik (*Washington Institute*, 2009:7-10).

Pasca pemilu legislatif di Palestina, Hamas memenangkan kursi legislatif pada 2006. Hamas pun juga mendirikan *Special Executive Force* di Gaza (Kerckanen, Rantanen, & Sundqvist, 2008: 19). Menteri Dalam Negeri Palestina, Nassar Yusef menyatakan pandangannya mengenai aktivitas yang dilakukan USSC bahwa, “Polisi sipil Palestina yang terlatih secara profesional dan mandiri adalah dasar bagi hukum dan ketertiban untuk mencapai negara Palestina yang aman dan independen” (Bouris, 2011: 13).

Senada dengan Menteri Dalam Negeri Palestina, dalam pidato di Tulkarm pada April 2009 di hadapan batalion yang telah menyelesaikan pelatihan di Yordania, Jendral Dayton menyatakan (Kushner dan Bedein, 2011: 7), “Ketika melihat Anda, saya tidak bisa lebih bangga dengan fakta bahwa Anda melangkah untuk menjadi pendiri negara Palestina.”

Di sisi lain, pemimpin senior Hamas merespon berdirinya USSC menyatakan bahwa “Ada rencana sistematis yang menargetkan perlawanan dan semua sayap, melalui tindakan opresif yang

dilakukan oleh pemerintahan Fayyad dan diawasi oleh Dayton berkoordinasi dengan pendudukan untuk membunuh atau menangkap pejuang” (Maannews.net).

Sementara itu, pada Mei 2010, Mayor Jenderal Israel, Avi Mizrahi mengatakan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh USSC bukanlah kepentingan Israel. Dalam media (Aljazeera.com), Mizrahi menyatakan:

Pasukan ini dilatih, dilengkapi, dididik Amerika. Ini berarti di awal pertempuran, kita akan membayar harga yang lebih tinggi. Pasukan tersebut bisa mematikan wilayah perkotaan dengan empat penembak jitu. Ini bukan militan Jenin lagi, ini kekuatan infantri yang kita hadapi dan perlu diperhitungkan. Mereka memiliki kemampuan menyerang dan kita tidak mengharapkan mereka menyerah dengan mudah.

Selanjutnya, AS memberikan bantuan keamanan melalui USSC berupa perlengkapan militer sebesar 2,3 juta dolar AS pada 2005. Pada pelaksanaan programnya, USSC juga dibantu oleh *European Police Coordinating Office for Palestinian Police Support* (EUPOL COPPS) yang berperan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk elemen keamanan Palestina (Kristoff, 2012: 5). EUPOLL COPPS fokus memberikan pelatihan dalam hal penegakan hukum sesuai dengan standar internasional (EU Council Factsheet, 2006: 1).

USSC juga mendapatkan dukungan dari Jordania melalui (JIPTC) untuk melatih *Presidential Guards* dan *National Security Forces* (NSF). Sama seperti EUPOL COPPS, JIPTC berperan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai keamanan operasi pemeriksaan, tahanan perang, patroli, pertahanan diri, dan kerusuhan sipil (US Department of State and the Broadcasting Board of Governors, 2011: 7).

Dayton menjelaskan dalam pidatonya bahwa pelatihan dilakukan di Yordania karena pemerintah Palestina ingin para pasukan dilatih di wilayah regional tapi jauh dari keluarga dan pengaruh politik. Di sisi lain, Israel memercayai Yordania sebagai tempat untuk pelatihan pasukan Palestina (Washington Institute, 2009: 7). Dayton mengatakan bahwa, “Para lulusan (dari pelatihan

program di Yordania) telah dididik secara ekstensif... pada kesetiaan pada bendera Palestina dan rakyat Palestina.” (Washington Institute)

Sebagai perbandingan, AS juga pernah memberikan bantuan keamanan untuk reformasi sektor keamanan untuk Libanon, Yordania, dan Mesir. Pada awal 2006, Lebanon mendapatkan bantuan senjata dan perlengkapan. Selain itu, AS juga menjalankan program untuk mengevaluasi pasukan Lebanon yang dikepalai oleh Brigadir Jendral Mark Kimmit. Dalam bantuannya, AS juga memberikan pelatihan, dan fasilitas (Sayigh, 2009: 9).

AS pertama kali memberikan bantuan untuk Libanon pada tahun 1980-an dalam bentuk hibah dan pinjaman sebesar 145 dolar AS dan 190 dolar AS untuk *Lebanese Armed Forces* (LAF) dalam konteks keperluan perang sipil. AS kembali memberikan bantuan pada tahun 1990-an saat perang sipil berupa kendaraan lapis baja dan helikopter (Addis, 2011: 2).

AS meningkatkan bantuan keamanan internal dan ekonomi pada multipel krisis Libanon pada 2005 dan 2009. AS juga melatih dan memberikan perlengkapan untuk LAF dan *Internal Security Forces* (ISF). Bantuan yang diberikan AS tidak ditujukan untuk pejuang Hezbollah (Sharp, 2010: 12).

Tujuan pemberian bantuan keamanan yaitu untuk memperkuat pemerintah Libanon dalam menghadapi konteks internal politik pemerintah terhadap Hezbollah, memperkecil pengaruh ekstremis sunni, dan bagian dari counterterrorism. Tujuan lainnya untuk memotong pengaruh dari Iran dan Syiria (Addis, 2010: 9-11). Pada 2005, paska Revolusi Cedar, Syiria meninggalkan Libanon dan membuat pihak anti-Syiria, pro-Barat untuk memberikan bantuan keamanan seperti AS. Pada 2006, AS berfokus untuk melatih LAF dan ISF (Addis, 2011: 1)

Selanjutnya, AS juga memberikan bantuan ekonomi dan militer untuk Yordania sejak tahun 1951. Pada 22 September 2008, AS kembali memberikan bantuan pada pemerintah Yordania

sebesar 660 juta dolar selama lima tahun periode melalui *Economic Support Funds* (ESF) dan *Foreign Military Financing* (FMF) (Sharp, 2010: 7). Untuk bantuan militer, AS meningkatkan perlengkapan angkatan udara Yordania dengan memberikan F-16 fighters, air to air missiles, sistem radar, dan helikopter blackhawk (Sharp, 2010: 8).

Dalam pengimplementasiannya, USSC didukung oleh EUPOL COPPS yang berperan meningkatkan kemampuan polisi Palestina salah satunya dengan memberikan materi pelatihan mengenai komunikasi radio. Tujuan pelatihan ini agar polisi dapat mengelola soal pertolongan pertama seperti obat-obatan (Kerkkanen, Rantanen, Sundqvist, 2008:24). Selain itu EUPOL COPPS juga memberikan pelatihan untuk polisi Palestina sebanyak 1.000 personil yang bertujuan untuk mengontrol dan menjaga keamanan wilayah dari konflik (Zanotti, 2010:24).

JIPTC melaksanakan pelatihan mengenai dasar penegakan hukum dan keamanan. Banyak pihak yang memberikan masukan terhadap kurikulum yang diberikan di JIPTC diantaranya INL, USSC, *the Jordanian Public Security Directorate*, dan pemerintah otonomi Palestina (Zanotti, 2010:18). Pelatihan tersebut dilakukan dalam waktu 19 minggu untuk semua anggota batalyon sepanjang 2007 hingga 2010. Materi yang disampaikan diantaranya yaitu pengoperasian senjata, pengendalian massa, pengoperasian jarak dekat, pematrolian, pengoperasian tahanan, dan pemeriksaan operasional. Materi lain berisi kursus kepemimpinan senior dan menengah. Pelatihan lainnya yaitu pelatihan lanjutan dilakukan untuk anggota batalyon terpilih (US GAO, 2010:1517).

Dua batalion Palestinian Guard atau sebanyak 400 personil mendapatkan pelatihan di JIPTC pada Februari hingga Maret 2008. Selain itu juga terdapat NSF kedua Batalion Spesial yang mendapatkan pelatihan sebanyak 700 personil dari Februari hingga Mei 2008. Lalu NSF ketiga dan keempat berjumlah 1.000 personil juga mendapatkan materi pelatihan. NSF ketiga dilatih pada September hingga Desember 2008. NSF keempat dilatih pada Februari hingga Juni 2009. NSF

pertama mendapatkan materi pelatihan pada Desember 2009 dan NSF kelima yang berjumlah 500 personil baru mengikuti pelatihan pada awal 2010. Semua pelatihan tersebut dilakukan di JIPTC (Zanotti, 2010:16).

Pelatihan di Tepi Barat ditujukan untuk anggota pasukan keamanan nasional Palestina agar memahami persoalan kepemimpinan, HAM, media, pemeliharaan peralatan, dan pengoperasian pelayanan makanan (US GAO, 2010:17). USSC melaksanakan 24 kursus dengan tema yang berbeda untuk Pasukan keamanan palestina di Tepi Barat antara 2008 hingga 2010.

Biro Diplomasi keamanan juga menyediakan pelatihan terbatas untuk pasukan pengawal presiden melalui program anti terorisme. Pelatihan ini berfokus pada operasi taktik polisi, pengembangan kepemimpinan di level senior dan menengah, kemampuan investigasi, dan kemampuan merespon situasi krisis. Pasukan keamanan Palestina dilengkapi dengan seragam, peralatan untuk tiap batalyon, alat pelindung, tenda, kendaraan, dan perlengkapan pertolongan (US GAO, 2010:17- 18).

Pasca melaksanakan pelatihan anggota pasukan keamanan, USSC menempatkan kamp-kamp operasi di tiga daerah di Palestina diantaranya Jericho, Jenin, dan Hebron. Di wilayah Jericho ditempatkan 750 personil dengan fasilitas 145 regu berkendara dan 40 kendaraan. Selain itu tersedia juga fasilitas klinis, alat komunikasi, persediaan logistik, dan pemeliharaan hewan. Di wilayah Jenin terdapat dua barak yang mengakomodasi 576 pasukan dan satu bangunan kantor berisi 100 pegawai. Selanjutnya, di Hebron terdapat bangunan yang dikhususkan untuk Pasukan keamanan nasional dan pasukan polisi spesial (US GAO, 2010:21).

Pusat pelatihan Nuweimah merupakan fasilitas yang diperbarui dan diperluas. Fasilitas di Nuweimah mengakomodasi sekitar 2000 pasukan dan 24 ruang kelas untuk 1500 orang. Di Jericho

terdapat universitas pelatihan presidential guard yang memberikan pendidikan mengenai hukum, peraturan untuk 250 personil (US GAO, 2010:22).

Operasi pertama dilaksanakan untuk ketertiban hukum di Nablus pada November 2007. Lalu Palestinian guard ketiga yang berjumlah 400 personil juga melakukan operasi di Jenin pada Mei hingga Juni 2008 dengan nama *Operations Hope and Smile*. Operasi tersebut bertujuan untuk *counterterrorism* (Zanotti, 2010:215). Hasil dari operasi tersebut, daerah operasi bersih dari senjata api dan mobil ilegal. Selain itu kelompok bersenjata juga tidak bisa berkeliaran di jalan secara terbuka.

Pada Oktober 2008 terdapat operasi *Homeland Rising* di Hebron, Tepi Barat. Sebanyak 600 personel keamanan ditempatkan untuk mencegah terjadinya konflik akibat pendudukan Israel. Lalu pada Desember 2008 sebanyak 1600 personil ditempatkan untuk menangani protes warga Palestina terhadap aksi militer Israel di Gaza. Selanjutnya pada April 2009 di Qalqiya NSF berhasil menggerebek ruang bawah tanah sebuah masjid yang berisi 80 kg bahan peledak. Pada operasi tersebut sebanyak tujuh orang tersangka ditangkap dan seorang pemimpin Hamas di Qalqiya yang selama ini masuk ke dalam daftar orang yang paling dicari Israel tewas (Zanotti, 2010:23).

Pemerintah AS menyediakan bantuan dalam bentuk peralatan seperti seragam, perlengkapan lapangan (tenda, terpal, botol air minum, dan lainnya), kendaraan, perlengkapan mata-mata, obat, komputer, dan perlengkapan lainnya yang memenuhi standar keamanan. Kebutuhan perlengkapan tersebut menghabiskan dana sebanyak 72,6 juta dolar AS pada tahun 2008 (Zanotti, 2010:19)

Dalam melakukan *reformasi* sektor keamanan, USSC dibantu oleh EUPOL COPPS yang tidak hanya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sektor keamanan tapi juga menyumbangkan perlengkapan yang dibutuhkan para polisi. Program ini dilaksanakan Juni 2005

hingga Oktober 2005. Peningkatan perbaikan perlengkapan diantaranya meninggikan tiang antena di daerah Khan Yonis, Hebron, Nablus, dan Jenin; mendistribusikan 600 GP 240 *handset*, 50 GP 280 radio *handset*, dan 90 stasiun radio (Kerkkanen, Rantanen, Sundqvist, 2008:3).

Selain itu, USSC melengkapi personil Palestinian Guard dan NSF dengan peralatan militer senilai 72,6 juta dolar AS. Bantuan peralatan tersebut meliputi seragam, tenda, kendaraan, obat-obatan, dan komputer (Zanotti, 2010:19). Walaupun banyak perlengkapan militer yang diberikan sebagai bantuan keamanan untuk Palestina, semua item tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari Israel (Zanotti, 2010:19).